

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik



Oleh:

**ARDI PURWA PANDHITA
07011281823084**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
AGUSTUS 2022**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera
Selatan**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi publik**

Oleh :

Ardi Purwa Pandhita

07011281823084

Pembimbing I

Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri., M.Si

NIP 196311061990031001

Pembimbing II

Sopyan Efendi S.Ip., M.Si

NIP. 19770512 200312 1 003

Tanda Tangan

Tanggal

11/7/2022
S/ef
2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Dr. Muhammad Nur Budiyanto S.sos M.PA

Nip. 19691110199411001

•
•
•
•



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 580572

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera
Selatan”**

Skripsi
Oleh:

Ardi Purwa Pandhita
07011281823084

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 21 Juli 2022

Pembimbing:

1. Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri., M.Si
NIP. 19631106 199003 1 001
2. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 19770512 200312 0 003

Penguji:

1. Dr. Alamsyah S.IP., M.Si.
NIP. 19780818 200912 1 002
2. Anang Dwi Santoso, S.A.P., M.P.A
NIP. 19931007 201903 1 012

Tanda Tangan

Tanda Tangan

Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004 ;

Ketua Jurusan Administrasi Publik.

Dr. M. Nur Budlyanto, S.Sos., MPA
NIP. 19691110 199401 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ardi Purwa Pandhita
NIM : 07011281823084
Tempat dan Tanggal Lahir : Bekasi, 09 Oktober 2001
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebnar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 19 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Ardi Purwa Pandhita

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Masa depan dan Masa lalu tidak ada bedanya jika kita tidak berubah”

(Ardi Purwa Pandhita)

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Ir. Hambar Warsito dan Ibunda Dra. Rini
2. Saudara Kandungku Jacinda dan Janitra
3. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
4. Alamamater Kebanggaanku

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan". Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah belum optimalnya penerapan standar akuntansi berbasis akrual di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, dengan adanya kekurangan tersebut berpengaruh pada implementasi kebijakan yang sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013. Tujuan penelitian ini adalah guna menganalisis permasalahan dalam Implementasi SAP berbasis akrual di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan Teori George Edwards III yang diukur dalam empat dimensi yaitu Sumber Daya, Struktur Birokrasi, Disposisi, dan Komunikasi. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan kesimpulan pada dimensi Sumber Daya sudah cukup baik, namun memiliki 1 kekurangan dalam sarana dan prasarana. Pada dimensi Disposisi sudah cukup baik dikarenakan Kasubbag Keuangan sudah memilih pegawai yang terampil, Kasubbag juga tegas dalam menindak pegawai, namun tidak diberi insentif kerja. Dalam Struktur Birokrasi, Disnakertrans Sumsel masih tidak cukup baik, karena koordinasi antar bidang yang selalu berantakan dan tidak adanya SOP secara resmi. Dalam Dimensi Komunikasi Pegawai sudah cukup baik mengikuti arahan yang diperintahkan. Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa sebaiknya Disnakertrans Sumsel menyempurnakan sarana dan prasarana yang tersedia di kantor, Pada tiap bidang atau bagian kerja di Disnakertrans Sumsel wajib melakukan koordinasi secara jelas, Disnakertrans wajib memiliki SOP penyusunan laporan keuangan yang jelas, Disnakertrans harus tegas dalam menegakkan hukuman, kesalahan atau pelanggaran dalam bentuk apapun harus dihukum, serta memberi insentif pada pegawai.

Kata Kunci: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, Implementasi Kebijakan, Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

Pembimbing I



Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri., M.Si
NIP. 196311061990031001

Pembimbing II



Sofyan Effendi S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Inderalaya, September 2022

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Dr. Muhammad Nur Budiyanto S.Sos., M.PA

NIP. 19691110199411001

ABSTRACT

This research is entitled "Implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards Policy at the Department of Manpower and Transmigration of South Sumatra Province". The background of this research is that the application of accrual-based accounting standards in the Department of Manpower and Transmigration of South Sumatra Province has not been optimal, with these deficiencies affecting the implementation of policies in accordance with Permendagri No. 64 of 2013. The purpose of this study is to analyze the problems in accrual-based SAP implementation in the Manpower and Transmigration Office of South Sumatra Province. This study uses a qualitative method. This study uses the theory of George Edwards III which is measured in four dimensions, namely Resources, Bureaucratic Structure, Disposition, and Communication. Data collection techniques used are observation, interview, documentation, and literature study. From the results of research and discussion, it is concluded that the dimensions of Resources are quite good, but have 1 deficiency in facilities and infrastructure. In the Disposition dimension, it is quite good because the Head of the Finance Subdivision has selected skilled employees, the Sub-Division Head is also firm in taking action against employees, but is not given work incentives. In terms of the bureaucratic structure, the South Sumatra Manpower and Transmigration Office is still not good enough, because the coordination between fields is always messy and there is no official SOP. In the Communication Dimension, employees are good enough to follow the directions that are ordered. The results of this study recommend that the South Sumatra Manpower and Transmigration Office should improve the facilities and infrastructure available in the office, In each field or work section at the South Sumatra Manpower and Transmigration Office, it is obligatory to coordinate clearly, the Manpower and Transmigration Office must have a clear SOP for preparing financial statements, the Manpower and Transmigration Office must be firm in enforcing penalties, mistakes or violations of any kind must be punished, as well as provide incentives to employees.

Keyword: Accrual Basic, Department of Manpower and Transmigration of South Sumatra Province, Policy Implementation.

Advisor I



Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri., M.Si
NIP. 196311061990031001

Advisor II



Sofyan Effendi S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Inderalaya, September 2022

Chairman of the Department of Public Administration
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University



Dr. Muhammad Nur Budiyanto S.Sos., M.PA
NIP. 19691110199411001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat dan ridho-Nyalah sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan Judul “Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan” yang merupakan salah satu usaha dan pencapaian penulis dalam memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan S-1 pada jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam penulisan skripsi ini, maka penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Ridho-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Kedua Orang tua-ku tersayang, yang selalu mendidik, dan mendoakanku dalam setiap hal yang telah ku perbuat dan selalu sabar dan tetap menyayangiku dalam situasi apapun.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fisip Unsri
4. Bapak Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D. selaku Wakil Dekan I, Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd selaku wakil dekan II, dan Bapak Dr. Andries Lionardo, M.Si. selaku wakil dekan III
5. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si dan Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Pembimbing Skripsi saya yang telah memberikan masukan dan membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen pengajar yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
7. Seluruh *Staff* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
8. Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan untuk membantuku dalam menyelesaikan skripsiku
9. Aulia Aufa yang telah membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Pahhi dan Kenten Manji yang senantiasa mendukung saya dalam pengerjaan skripsi.
11. Teman-Teman Seperjuanganku Administrasi Publik 2018 yang telah memberikan semangat, motivasi, serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kota Palembang, yang telah memperkenalkanku tentang dunia perkuliahan, tentang teman baru, tentang kehidupan baru, Cerita tentang perkuliahanku ini akan senantiasa bakal kuingat selama hidupku

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang berkepentingan. Kritik dan Saran yang membangun kearah yang lebih baik untuk skripsi ini dan maupun penulis, sangat diharapkan untuk perbaikan kedepannya.

Palembang, 19 Juli 2022



Ardi Purwa Pandhita

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Landasan Teori.....	13
1. Implementasi Kebijakan.....	13
2. Standar Akuntansi Pemerintah	15
B. Teori-Teori Implementasi Kebijakan.....	17
1. Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III	19
2. Model Implementasi Kebijakan Donald Van Meter dan Carel Van Horn.....	22
3. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle	23
4. Model Implementasi Kebijakan David L. Weimer dan Aidan R. Vining	24
C. Teori Implementasi Kebijakan yang Digunakan.....	24
D. Penelitian Terdahulu	27
E. Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III.....	32
METODE PENELITIAN	32

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Definisi Konsep.....	32
C. Fokus Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
1. Jenis Data	35
2. Sumber Data.....	35
E. Informan Penelitian.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data.....	37
H. Lokasi Penelitian.....	38
I. Sistematika Penulisan	38
BAB IV.....	37
HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
1. Sejarah Terbentuknya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan	37
2. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang	40
3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	40
4. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akual	43
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	48
1. Sumber Daya	49
2. Disposisi	59
3. Struktur Birokrasi.....	64
4. Komunikasi	67
BAB V.....	73
KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Akuntansi Basis Kas dan Akuntansi Basis Akrual	8
Tabel 2. Contoh Rincian Neraca Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera selatan.....	9
Tabel 3. Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan	10
Tabel 4. Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 5. Fokus Penelitian	31
Tabel 6. Laporan Realisasi Anggaran Disnakertrans 2021	45
Tabel 7. Laporan Operasional Disnakertrans 2021	46
Tabel 8. Laporan Perubahan Ekuitas Disnakertrans 2021	48
Tabel 9 Latar Belakang Pegawai Sub Bagian Keuangan	55
Tabel 10. Analisis Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Faktor Penentu Implementasi Edwards III (dalam Tahir, 2014:61).....	21
Gambar 2. Kerangka Pemikiran	30
Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan	40
Gambar 4. Sturktur Organisasi Balai Latihan Kerja, Pengembangan Produktivitas dan Keterampilan Transmigrasi (BLKPPKT).....	42
Gambar 5. Bendahara Keuangan dan Aset Ibu Helen menyusun Saldo Awal	49
Gambar 6. Pak Hendri sebagai Penyusun Laporan Keuangan	50
Gambar 7. Wawancara dengan Kasubbag Keuangan Pak Sido Santoso	51
Gambar 8. Kepatuhan Pegawai Disnakertrans Sumsel dalam Melakukan Pekerjaan	53
Gambar 9. Pegawai Sub Bagian Keuangan Disnakertrans Sumsel	54
Gambar 10. Pegawai Lelaki yang terus mengajak ngobrol dengan Bendahara Keuangan.....	54
Gambar 11. Laptop Pribadi Pak Hendri Operator Akuntansi	57
Gambar 12. Komputer Operator Akuntansi yang Tidak Bisa Digunakan	58
Gambar 13. SIMDA Keuangan	58
Gambar 14. Router Internet Sub Bagian Keuangan Disnakertrans Sumsel.....	59
Gambar 15. Pegawai Berkaraoke Pada Jam Kerja Tidak Diberi Hukuman	63
Gambar 16. Pegawai dari Bidang Sub Bag Perencanaan melaporkan Rekonsiliasi Aset di Sub Bagian Keuangan	65
Gambar 17. Alur Penyusunan Laporan Keuangan menurut Pak Hendri	67
Gambar 18. Sosialisasi Dilakukan Secara Daring Pada Tahun 2021	68
Gambar 19. Bendahara Keuangan Dan Aset Yang Konsisten Bekerja Dalam Merekonsiliasi Aset	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penelitian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan	74
Lampiran 2. Kartu Bimbingan 1 Seminar Proposal.....	75
Lampiran 3. Kartu Bimbingan 2 Seminar Proposal.....	76
Lampiran 4. Surat Keterangan Skripsi.....	77
Lampiran 5. Kartu Bimbingan 1 Ujian Komprehensif	78
Lampiran 6. Kartu Bimbingan 2 Ujian Komprehensif	79
Lampiran 7. Pedoman Wawancara	80
Lampiran 8. Dokumentasi Wawancara	82

DAFTAR SINGKATAN

SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
Disnakertrans Sumsel	: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan
Kasubbag	: Kepala Sub Bagian
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPKAD	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PP	: Peraturan Pemerintah
NPM	: <i>New Public Management</i>

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan cara bagaimana mengelola kepentingan publik. *Good governance* menekankan cara pemerintah dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi serta kebijakan administratif termasuk dalam pengelolaan keuangan negara (Mardiasmo, 2018). Guna mewujudkan *good governance*, pemerintahan di Indonesia perlu mereformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik. Reformasi kelembagaan meliputi pembenahan seluruh alat pemerintahan di daerah dari struktur hingga infrastruktur. Hal utama yang menjadi keberhasilan reformasi kelembagaan tersebut berawal dari pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, seperti publik yang menjadi *stakeholder*, pemerintah daerah sebagai eksekutif, serta DPRD yang menjadi *shareholder*. Reformasi manajemen sektor publik merupakan model manajemen pemerintahan yang modern. Manajemen sektor publik berkembang sejak diperkenalkannya *New Public Management* (NPM) yang berfokus pada kinerja bukan kebijakan. Maka dari itu, pemerintah daerah memiliki peran yang lebih penting dari sebelumnya, karena tidak hanya bertindak dalam mengatasi kegagalan kebijakan, namun juga mengatasi kegagalan kinerja pemerintahan itu sendiri.

Sebagaimana fokus dari reformasi manajemen sektor publik maka pemerintah daerah wajib menjadi agen utama bagi masyarakat, serta pemimpin dan penjaga atas aturan bersama. Pemerintah daerah wajib mempraktikkan aktivitas pemerintah yang transparan dan tidak dirahasiakan. Kinerja pemerintah daerah tidak bisa tertutup pada resiko, pemerintah daerah harus inovatif yang berani mengambil resiko dalam batas yang dapat ditoleransi, serta pelayanan yang gesit dan fleksibel.

Penguasaan sistem dalam lembaga negara harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berjalan guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Reformasi sistem yang terjalin pada instansi pemerintahan, memotivasi lembaga pemerintah dalam menciptakan sebuah sistem penatakelolaan *good governance*, hal ini dilakukan demi melahirkan pemerintahan yang terbuka (transparansi), akuntabel, demokratis, bersih hingga partisipatif, tujuan tersebut demi mencapai tata kelola pemerintahan yang mempunyai kredibilitas tinggi (Langelo, Saerang and Alexander, 2015).

Pemerintahan dengan prinsip *good governance* membutuhkan reformasi pada prinsip tata kelola instansi pemerintahan yang modern dan esensial serta memaksa suatu sistem, sehingga sanggup memastikan pemerintah daerah mampu bersaing secara nasional dan tidak terus menerus ketergantungan pada pemerintah pusat. Salah satu bentuk usaha dalam menerapkan *good governance* adalah melakukan penyempurnaan pengelolaan keuangan negara dimulai sejak penetapan UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketentuan dalam salah satu UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 32 Ayat 1 adalah mewajibkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Menurut UNDP dalam Mardiasmo (2018) *good governance* memiliki sembilan (9) karakteristik, antara lain:

- a. Partisipasi, masyarakat harus terlibat dalam pembuatan keputusan secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Supremasi hukum, kerangka hukum harus dilaksanakan seadil-adilnya tanpa memandang status.
- c. Transparansi, pemerintah harus memberikan kebebasan publik dalam memperoleh informasi.

- d. Responsif, lembaga publik tanggap dalam melayani *stakeholder*.
- e. Orientasi Konsensus, lembaga publik wajib berorientasi pada kepentingan masyarakat.
- f. Ekuitas, setiap masyarakat tidak dibeda-bedakan dan memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan.
- g. Efisiensi dan Efektivitas, pengelolaan sumber daya publik wajib dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- h. Akuntabilitas, lembaga publik harus bertanggung jawab kepada publik atas setiap kegiatan yang dilaksanakan.
- i. Visi, pemerintah dan masyarakat harus berpikir panjang ke depan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Kesembilan karakteristik yang telah diuraikan, terdapat tiga hal yang dapat diterapkan pada akuntansi sektor publik yaitu transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dan efektivitas.

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan perubahan standar akuntansi pemerintahan selaku pengganti dari PP Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara, hal ini berkaitan dengan amanat yang tertuang pada Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, menekankan bahwa pengakuan pendapatan dan beban berbasis akrual tidak diakui sampai diakuinya pendapatan dan beban berbasis kas. Menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, pengakuan pendapatan dan beban berbasis akrual wajib diimplementasikan paling lama dalam waktu lima tahun setelah Pasal tersebut diterbitkan. Pengelolaan keuangan entitas pemerintahan telah berubah secara mendasar disebabkan dari reformasi pengelolaan keuangan. Peraturan baru tersebut menjadi dasar

bagi institusi negara untuk mengubah pola administrasi keuangan (*financial administration*) menjadi pengelolaan keuangan negara (*financial management*). Demi mewujudkan *good governance*, pemerintah terus membenahi masalah administratif dan melakukan beragam cara demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Sebagai salah satu cara guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik salah satunya dengan mengembangkan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana disebutkan dalam pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13,14, 15 dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas”

Pada intinya ketentuan Undang-Undang yang telah disebutkan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan paling lama atau selambatnya dalam lima tahun, yaitu pada tahun 2008. Maka dari itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menerapkan penggunaan basis kas menuju akrual (*Cash Toward Accrual*), yaitu laporan realisasi anggaran disusun menggunakan basis kas, sedangkan penyusunan neraca menggunakan basis akrual (Halim dan Kusufi, 2014).

Peraturan tersebut berkaitan dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menjelaskan mengenai bentuk dan isi yang tertuang dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPJ) APBN atau APBD wajib dikelola dan disajikan

seperti yang telah diatur pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), penegasan dalam menggunakan SAP secara jelas tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 71 Tahun 2010 yang mewajibkan SAP berbasis AkruaI pada instansi pemerintahan.

Transisi pengelolaan akuntansi berbasis kas ke basis akruaI disebabkan oleh adanya ketidakpuasan terhadap akuntansi berbasis kas, hal ini dikarenakan kurangnya penyajian gambaran keuangan yang akurat. Sehingga perubahan ke basis akruaI diharapkan akan mampu dalam meningkatkan kualitas informasi manajerial yang memuaskan guna memfasilitasi perencanaan dan proses kinerja (Cohen et. Al, 2007). Pada praktiknya, penerapan akuntansi berbasis akruaI di pemerintahan Indonesia cukup sulit, karena pemerintahan sudah terbiasa dengan basis kas yang telah digunakan bertahun-tahun. Penerapan basis akruaI membutuhkan penyesuaian-penyesuaian dalam lingkungan instansi, karena beradaptasi dengan hal baru memberikan kerumitan tersendiri sehingga implementasi tidak dapat segera diterapkan, selain itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama (Halim dan Kusufi, 2014). Hal tersebut tidak menghalangi pemerintah pusat maupun daerah untuk tidak melaksanakan basis akruaI. Karena sudah dipertegas dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 mengenai penerapan SAP berbasis akruaI di Pemerintah daerah diterbitkan pada tanggal 3 Desember 2013, peraturan tersebut dibentuk guna menindaklanjuti PP Nomor 71 Tahun 2010. Permendagri tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman oleh pemerintah daerah ketika menyusun kebijakan akuntansi daerah serta Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) meliputi Bagan Akuntansi Standar (BAS). Kebijakan dan SAPD tersebut kemudian dituangkan dalam peraturan kepala daerah.

Perubahan SAP berbasis kas ke basis akruaI menimbulkan permasalahan. Persoalannya, banyak instansi pemerintah daerah yang belum sepenuhnya mengadopsi

SAP berbasis akrual, padahal Permendagri 64 Tahun 2013 sudah diterbitkan. Akibatnya, penggunaan SAP akrual (*accrual basis*) dalam akuntansi pemerintah daerah hingga saat ini belum sempurna. Dengan kata lain, beberapa pemerintah daerah terus memanfaatkan SAP basis kas (*cash basis*) dan SAP kas menuju akrual (*cash towards accrual*) dalam berjalannya pemerintahan. Hal tersebut menggambarkan bahwa lembaga pemerintah memiliki keharusan dalam menerapkan SAP terbaru dengan segera yang sebelumnya menggunakan basis kas, wajib diganti dengan basis akrual selambat-lambatnya pada tahun 2015. Tindakan yang dimiliki oleh beberapa instansi pemerintah daerah cukup disayangkan, mengingat PP Nomor 71 Tahun 2010 mengatur bahwa seluruh instansi pemerintah di Indonesia paling lambat menggunakan basis akrual pada tahun 2015, ditambah lagi Pergub Sumatera Selatan No. 83 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Pergub Sumatera Selatan No. 50 Tahun 2014 yang mendukung adanya kebijakan akuntansi pemerintah pada tingkat provinsi sayangnya di tahun 2022 ini terdapat instansi pemerintah daerah yang masih belum mengimplementasikan SAP berbasis akrual dengan baik.

Penerapan akuntansi berbasis akrual semestinya wajib diterapkan pada setiap instansi pemerintahan daerah termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Implementasi SAP berbasis akrual di instansi pemerintah menghadirkan rintangan baru, oleh karena itu, proses implementasi SAP berbasis akrual harus berjalan lancar dan didukung oleh sumber daya manusia yang meliputi pengguna dan penyedia informasi keuangan, infrastruktur sistem informasi di instansi pemerintahan Indonesia. Sebagai instansi pemerintahan, sumber pendanaan dalam berjalannya kegiatan pemerintahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera Selatan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain, sudah seharusnya Disnakertrans Sumsel

melaporkan pengelolaan keuangan APBD kepada pemangku kepentingan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu menggunakan SAP berbasis akrual berdasarkan kewenangan PP. 71 tahun 2010 sebagai tindakan dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas publik. Selain itu, dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, diperlukan infrastruktur yang memadai.

Penerapan SAP berbasis akrual merupakan bentuk dari praktik manajemen keuangan yang modern terutama di sektor publik. Metode akuntansi akrual berkontribusi pada transparansi pemerintah dengan memberikan informasi yang lebih terbuka tentang biaya pemerintah terlebih lagi dalam memajukan kualitas penetapan keputusan dalam lingkup pemerintah melalui penggunaan data yang dapat diukur. Demi mewujudkan implementasi SAP berbasis akrual yang optimal, diperlukan aparatur pemerintah yang dapat mengimplementasikannya dalam pekerjaan rutinnnya. Ruang lingkup pemerintah biasanya tertutupi oleh kesulitan-kesulitan yang khas, terutama sumber daya manusia yang tidak memadai untuk mengelola keuangan negara, terutama aparatur pemerintah yang tidak kompeten yang cenderung menolak atau bersikap resisten terhadap reformasi.

Infrastruktur yang memadai sangatlah penting demi mendukung penerapan aturan akuntansi pemerintah berbasis akrual. Infrastruktur sangat penting untuk kinerja proses pelayanan publik, karena tanpa elemen ini, tidak ada kegiatan yang akan memberikan hasil yang diinginkan. Faktor lain yang penting dalam aplikasi SAP berbasis metode akrual adalah komitmen organisasi. Dalam situasi ini, pemimpin yang berkuasa memiliki otoritas pengambilan keputusan.

Salah satu penyebab beberapa instansi pemerintahan daerah tidak melakukan pekerjaan dengan baik dalam membuat laporan keuangan adalah bahwa para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terutama yang mendapatkan banyak uang dari sumber

yang berbeda (disverifikasi), tidak bekerja sekeras yang seharusnya. Dukungan kepemimpinan yang kuat sangat penting untuk keberhasilan suatu transformasi, komitmen organisasi tidak kalah pentingnya dalam menerapkan SAP berbasis akrual (Simanjuntak, 2010).

Tabel 1. Perbedaan Akuntansi Basis Kas dan Akuntansi Basis Akrual

Akuntansi Basis Kas	Akuntansi Basis Akrual
Pada saat dana diterima dan disetorkan ke kas negara/daerah, pendapatan diakui.	Pendapatan dicatat pada saat terjadi transaksi meskipun tidak ada dana yang diterima atau disetorkan ke kas negara maupun daerah.
Beban (dalam Basis Kas / Kas Menuju Akrual dikenal sebagai Belanja) dicatat hanya setelah uang tersebut keluar dari kas negara/daerah.	Beban dicatat pada saat terjadinya tagihan tanpa memperhatikan apakah dana tersebut telah diambil dari kas negara/daerah.
Tidak mengetahui apa itu utang dan piutang	Memahami utang dan piutang
Informasi keuangan kurang dapat diandalkan karena mengacu pada periode waktu tertentu.	Data keuangan lebih akurat karena setiap transaksi didokumentasikan dengan cermat.

Sumber: *Permendagri Nomor 64 Tahun 2013*

Selain itu ada 7 komponen LKPD penting penyusun SAP berbasis akrual yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
3. Laporan Operasional (LO)
4. Neraca
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
6. Laporan Arus Kas (LAK)
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Sejak diberlakukannya Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, terbitlah Pergub Sumatera Selatan No. 83 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Pergub Sumatera Selatan No. 50 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dimana isi Pergub tersebut mendukung adanya perubahan dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan SAP AkruaI. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan (Disnakertrans Sumsel) sudah menerapkan SAP berbasis akruaI, seperti rincian neraca berikut ini:

Tabel 2. Contoh Rincian Neraca Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan / (Penurunan)
Aset Lancar	8.030.450,00	7.117.195,00	(913.255)
Investasi Jangka Panjang	-	-	-
Aset Tetap	72.650.608.534,19	75.586.355.680,00	2.935.747.146
Aset Lainnya	271.742.653,00	174.551.450,00	(97.191.203)
Dana Cadangan	-	-	-
Kewajiban	-	-	-
Ekuitas	72.930.381.637,19	75.768.024.325,00	2.837.642.668

Sumber: *Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan 2022*

Dalam menyusun laporan keuangan, Disnakertrans Sumsel sudah mengadopsi standar yang dibentuk oleh KSAP seperti yang terdapat pada tabel 2. Contoh pada tabel 2 menjelaskan Disnakertrans Sumsel telah menerapkan standar yang dibentuk oleh KSAP, yang dimana dalam penyusunan neraca disebutkan bahwa Ekuitas tidak dirinci, hanya ditampilkan jumlahnya saja. Namun dalam penyusunan laporan keuangan terdapat 7 (tujuh) komponen penyusunan guna membuat laporan keuangan yang sempurna, namun Disnakertrans Sumsel hanya memiliki 6 (enam) komponen yang telah sempurna, hanya ada satu komponen yang tidak dirinci secara jelas yaitu komponen Laporan Arus Kas. Komponen tersebut merupakan hal penting dalam penyusunan

laporan keuangan. Ketidakadaan komponen tersebut menunjukkan kekurangan dari Disnakertrans Sumsel dalam penerapan SAP Akruwal.

Saat ini kendala lain yang turut dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam mengimplementasikan akuntansi basis akrual adalah sumber daya yang menunjang SAP Akruwal, termasuk sumber daya manusia yang andal dibidang akuntansi baik kualitas maupun kuantitas.

Tabel 3. Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan

Kelompok	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan	142	65	207
Pegawai Sub Bagian Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan	5	6	11

Sumber: *Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan 2022*

Fokus permasalahan sumber daya manusia disini ialah pelaksana kegiatan penyusunan laporan keuangan dengan SAP Akruwal di Sub Bagian Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan ialah aparat yang hanya mengenyam pendidikan SMP. Hal tersebut cukup disayangkan karena peranan vital pada instansi tidak dipegang dengan tenaga ahli yang mengenyam pendidikan lebih tinggi. Jika dilihat dari kuantitasnya, dari 11 pegawai yang berada di Sub Bagian Keuangan hanya 1 (satu) pegawai saja yang melakukan kegiatan penyusunan laporan keuangan dan dibantu dengan 1 bendahara. Terlebih lagi didalam Sub Bagian Keuangan tersebut memiliki pegawai yang merupakan sarjana dari program studi ekonomi dan akuntansi, namun mereka tidak memegang kendali penuh atas penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan SAP Akruwal.

Selain itu sarana dan prasarana menjadi perhatian peneliti, karena dalam menerapkan SAP Berbasis Akruwal Disnakertrans Sumsel telah menggunakan teknologi

informasi berupa situs pengelola keuangan. Situs tersebut bernama SIMDA dan E-Sumsel. Dari kedua Situs tersebut yang cukup baik dalam pengelolaan keuangan ialah SIMDA. Namun menurut pengakuan dari pegawai Sub Bagian Keuangan, performa Situs SIMDA terkadang tidak maksimal dan sering mengalami *error* dalam penginputan data. Maka dari itu, terkadang pegawai Sub Bagian Keuangan memakai perhitungan menggunakan Excel agar lebih akurat. Tidak maksimalnya teknologi informasi yang diterapkan menyebabkan proses penerapan SAP Akrua menjadi tidak efisien. Maka dari itu dibutuhkan aplikasi atau situs yang lebih unggul dalam penyusunan laporan keuangan yang terintegrasi.

Komitmen organisasi pada Disnakertrans Sumsel beranggapan bahwa basis akrua merupakan basis yang cenderung lebih baik dari basis akuntansi kas yang sebelumnya pernah diterapkan, namun dalam sudut pandang lain menganggap hal tersebut merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan kepatuhan terhadap peraturan yang ada.

Disnakertrans Sumsel menerima dana dari APBD untuk operasional dan kegiatan pemerintahan. Menurut aturan akuntansi pemerintah, laporan keuangan wajib dibuat oleh Disnakertrans Sumsel karena berfungsi sebagai sarana untuk memastikan pengelolaan dana yang diterimanya. Standar akuntansi pemerintahan digunakan sebagai dasar untuk memberikan opini atas laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Penerapan basis akrua pada Disnakertrans Sumsel masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, Disnakertrans Sumsel sudah semestinya memperbaiki sistem akuntansi yang ada didalamnya demi membentuk kesiapan dalam menerapkan SAP akrua, hal yang perlu diperbaiki antara lain ialah pembangunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrua, pengembangan sumber daya manusia (pelatihan atau bintek), dan penyediaan infrastruktur untuk

memungkinkan dalam penerapan basis akrual. Perbaikan tersebut dapat diharapkan sebagai solusi oleh Disnakertrans Sumsel untuk mengatasi kesulitan dalam penerapan SAP berbasis Akrual.

Sesuai dengan apa yang sudah peneliti jelaskan pada latar belakang permasalahan, hal ini membantu peneliti guna melakukan penelitian tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh para peneliti. Tujuan penelitian ini adalah guna menganalisis permasalahan dalam Implementasi SAP berbasis akrual di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Alhasil, peneliti berhasil mengangkat judul “Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah guna menganalisis permasalahan Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Aspek teoritis dan praktis dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1.1 Bagi Pembaca, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut dan sebagai sumber informasi untuk penelitian masa depan.
- 1.2 Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis terhadap kesiapan Disnakertrans Sumsel dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

2. Secara Praktis

Manfaat secara praktis dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 2.1 Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan masukan bagi pemerintah yang hendak menerapkan standar akuntansi basis akrual diwaktu mendatang.
- 2.2 Manfaat praktis bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan, temuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberi solusi permasalahan dan membantu dalam penyusunan standar akuntansi pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asfiansyah, A. (2015). Strategi Implementasi Akuntansi Akrual Pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota “S”). In *Jurnal Neo-Bis* (Vol. 9, Issue 1).
- Darise, N. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi 2* (2nd Ed.). Indeks.
- Darma, S. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Di Kota Tanjungbalai*.
- Erlita D.S. Ranuba, Sifrid Pangemanan, & Sherly Pinatik. (2015). Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan Pp No. 71 Tahun 2010 Pada Dpkpa Minahasa Selatan. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 388–397.
- Ferdian, F. (2015). *Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Di Kota Padang*.
- Fitriawati, M. (2017). Perkembangan Infrastruktur Teknologi Informasi Dari Evolusi Infrastruktur. *Jurnal Teknologi Dan Informasi*, 7(1), 79–87.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Herwiyanti, E., Sukirman, S., & Sufi Aziz, F. (2017). Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 19(1).
- Kartika, L., Dewi, U., Yuniarta, G. A., Aristia, M., Jurusan, P., & Program, A. (2017). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap keberhasilan Penerapan Sap Berbasis Akrual (Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Badung)* (Vol. 8, Issue 2).
- Kusuma, R. S. (2013). *Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*.
- Millah, N., Dawud, J., & Listiani, T. (2019). Strategi Implementasi Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(2), 289–303.
- Mua’am, A. (2015). Basis Akrual Dalam Akuntansi Pemerintah Di Indonesia. *Jurnal Lingkar Widyaismara*, 2(1), 38–46. www.juliwi.com
- Nordiawan, D. (2012). *Akuntansi Pemerintah*. Salemba Empat.
- Prilen, G., David, H., Saerang, P. E., & Karamoy, H. (2015). Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dan Dampaknya Terhadap Sumber Daya Manusia Pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Goodwill*, 6(2), 64–75.

- Sampel, I. F., Kalangi, L., & Runtu, T. (2015). Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Manado Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Basis Akrua. *Jurnal Emba : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 621–630.
- Simanjuntak, B. H. (2005). Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 1–15.
- Sitorus, S., Kalangi, L., & Walandouw, S. K. (2015). Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Berdasarkan Pp. No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Emba : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 941–949.
- Sulaiman. (2016). *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah*.
- Wayan, I., Yogiswara, G., Putra, D., & Ariyanto, D. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. *E-Jurnal Akuntansi*, 13(1), 14–32.

